

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTABILITAS DAN
TRANSPARANSI TERHADAP PP NO. 71 TAHUN 2010
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DI BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA
BANDAR LAMPUNG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Akuntansi
Syariah

Oleh

Yurike Annisa' Amsy

NPM : 1751030157

Program Studi : Akuntansi Syariah



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1443 H/2021 M

**ANALISIS PENERAPAN PP NO. 71 TAHUN 2010 DALAM
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA
BANDAR LAMPUNG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Akuntansi
Syariah

Oleh

Yurike Annisa' Amsy

NPM. 1751030157

Program Studi : Akuntansi Syariah

Pembimbing I :Dr. Rubhan Masykur, M.Pd.

Pembimbing II :Dinda Fali Rifan, S.E., M.Ak.

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1443 H/2021

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal untuk mendapatkan gambaran yang jelas terkait judul skripsi. Makanya diperlukan adanya penjelasan terhadap istilah yang terkait dengan judul **“Analisis Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi terhadap PP No. 71 Tahun 2010 dalam Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung”**.

Analisis berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya). Analisis juga dapat diartikan sebagai penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya.¹

Penerapan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan menerapkan. Kata penerapan dapat juga berarti menerapkan yang berarti mengenakan atau mempraktikkan.²

Akuntabilitas berarti mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.³

¹ “Arti Kata Analisis - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” akses Maret 15, 2021, <https://kbbi.web.id/analisis>.

² “Arti Kata Terap² - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” akses Maret 15, 2021, <https://kbbi.web.id/terap-2>.

³ Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010,” 2010, 1–413, <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

Transparansi berarti memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.⁴

PP No. 71 Tahun 2010 merupakan Peraturan yang memuat tentang Standar Akuntansi Pemerintahan untuk pemerintahan pusat dan daerah dimana seluruh laporan keuangan harus sudah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual paling lambat tahun anggaran 2015.⁵

Penyusunan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, dan tindakan penyusunan (seperti penyusunan kamus, ensiklopedia). Kata penyusunan berasal dari kata susun yang berarti kelompok atau kumpulan yang tidak berapa banyak.⁶

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi lainnya yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.⁷

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan departemen yang menjalankan fungsi penunjang bidang keuangan dan tugas pembantuan. Kedudukan BPKAD sebagai pelaksana dibidang keuangan dan aset daerah yang menyangkut bidang penerimaan, belanja, pembiayaan dan aset daerah yang di pimpin oleh seorang kepala badan sekaligus sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Pejabat

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

⁶ “Arti Kata Susun - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” akses Maret 15, 2021, <https://kbbi.web.id/susun>.

⁷ Indonesia, “Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010.”

Penatausahaan Barang Milik Daerah serta melaksanakan fungsi selaku Bendahara Umum Daerah.⁸

B. Latar Belakang Masalah

Pemerintah akan terus melakukan pembenahan pengelolaan keuangan negara dengan merumuskan kebijakan, peraturan perundang-undangan, menyiapkan infrastruktur sistem keuangan berupa *hardware* dan *software*, serta mempersiapkan sumber daya manusia termasuk pembangunan struktur organisasi pemerintahan.⁹ Pada tahun 2010 pemerintah mengeluarkan peraturan baru tentang standar akuntansi pemerintahan. Peraturan Pemerintah Indonesia untuk seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah harus sudah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual (*accrual basis*).

Dasar hukum penerapan SAP berbasis akrual yaitu PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP sebagai amanat dari UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. PP No. 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang penggunaan basis akrual dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah, untuk menggantikan PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP berbasis kas menuju akrual (*cash towards accrual*). PP No. 71 Tahun 2010 disebutkan SAP berbasis akrual dilakukan empat tahun setelah tahun 2010 yang artinya dilaksanakan pada 2015.¹⁰

Basis akrual merupakan basis akuntansi yang mengakui pengaruh suatu transaksi pada saat terjadinya tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. SAP berbasis akrual diadopsi dari keberhasilan pemerintah

⁸ “Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah,” accessed March 15, 2021, <https://www.blitarkab.go.id/2012/06/11/dinas-ppkad/>.

⁹ Fitria Ayu Lestari Niu, Herman Karamoy, dan Steven Tangkuman, “Analisis Penerapan PP No. 71 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamobagu” 2, no. 71 (2014): 714–22.

¹⁰ Sari Zawitri, Ninik Kurniasih, dan Theresia Siwi Kartikawati, “Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual Sebagai Implementasi PP No. 71 Tahun 2010 Pada Politeknik Negeri Pontianak,” *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan* 4, no. 1 (2015): 24, <https://doi.org/10.26418/jebik.v4i1.11459>.

negara-negara maju untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan pemerintah seperti Selandia Baru, Australia, Amerika Serikat, Inggris dan Swedia serta menjadi kesatuan reformasi dalam bidang pengelolaan keuangan pemerintah.¹¹ Penerapan akuntansi berbasis akrual memberikan manfaat yang sangat besar bagi suatu organisasi di pemerintahan. Manfaat-manfaat penerapan berbasis akrual yaitu: (1) Menyediakan gambaran utuh atas posisi keuangan pemerintahan; (2) Menunjukkan bagaimana aktifitas pemerintah dibiayai dan bagaimana pemerintah dapat memenuhi kebutuhan kasnya; (3) Menyediakan informasi yang berguna tentang tingkat yang sebenarnya kewajiban pemerintah; (4) Meningkatkan daya pengelolaan aset dan kewajiban pemerintahan; dan (5) Basis akrual sangat familiar pada lebih banyak orang dan lebih komprehensif dalam penyajian informasinya.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa “Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD”.¹² Pada standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, beberapa isu penting perubahan yang perlu dipahami adalah laporan keuangan pokok yang disusun pada Standar Akuntansi Pemerintahan lama (PP No. 24 Tahun 2005) terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (2) Neraca; (3) Laporan Arus Kas; (4) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Sedangkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan PP No. 71 Tahun 2010 komponen laporan

¹¹ Rina Mediaswati, “Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah,” *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)* 17, no. 1 (2013): 29–45, <https://doi.org/10.22146/jkap.6847>.

¹² Ni Nengsih Dwi Wiryaningsih, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, dan Made Aristia Prayudi, “Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Bangli,” *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha* 8, no. Transisi dari Kas Basis ke Akrual Basis (2017): 12, <https://ejournal.undiksha.ac.id/>.

keuangannya terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL); (3) Neraca; (4) Laporan Operasional (LO); (5) Laporan Arus Kas (LAK); (6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).¹³

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dalam suatu periode. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi, efektivitas, dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu ketentuannya terhadap peraturan perundang-undangan. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesungguhnya adalah dalam rangka meningkatkan kuantitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannya akan mewujudkan transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintahan sehingga *Good Governance* dapat tercapai.¹⁴

Standar akuntansi pemerintah berbasis akrual diharapkan lebih sistematis menuju pengelolaan keuangan yang lebih baik sebagai salah satu agenda reformasi keuangan di Indonesia, serta tantangan di era globalisasi sekarang ini yaitu adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah dengan adanya akuntansi pemerintahan. Mewujudkan akuntabilitas dengan pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) aktivitas serta kinerja keuangan pemerintah melalui laporan keuangan kepada seluruh stakeholder diperlukan karena pemerintah adalah subjek informasi untuk memenuhi hak-hak publik yakni hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi dan

¹³ Ibid.

¹⁴ Niu, Karamoy, and Tangkuman, "Analisis Penerapan PP No. 71 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamobagu"

didengar aspirasinya. Sedangkan tantangan akuntansi pemerintahan untuk mewujudkan transparansi atau keterbukaan informasi terkait pada aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada stakeholder dalam mengambil keputusan, sehingga informasi akuntansi pada laporan keuangan yang disajikan kepada masyarakat harus handal dan tepat waktu.¹⁵

Akuntabilitas dan transparansi sangat erat kaitannya dalam menjalankan organisasi, dalam pengelolaan keuangan organisasi nirlaba sama halnya bahwa kita yang diamanahkan sebagai pengelola keuangan harus transparan, apa adanya, tidak ada satupun informasi yang dilebih-lebihkan atau dikurangi, karena sikap amanah sendiri berarti menyangkut kejujuran dan dapat dipercaya, jika dikaitkan dengan organisasi artinya, sebagai pengelola keuangan kita harus berkata jujur, dalam mengemban amanah agar selalu dapat dipercaya untuk menjalankan amanah tersebut karena bentuk pertanggungjawabannya bukan hanya pada ummat akan tetapi pada Tuhan Yang Maha Esa. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan organisasi diharapkan mampu mewujudkan pertanggungjawaban tindakan dan keputusan dalam laporan keuangan guna membangun kepercayaan, pengelola berkewajiban untuk melaporkan menjelaskan tiap aktivitas keuangan yang terjadi baik adanya dana masuk ataupun keluar, transparansi disini dimaksudkan adanya keterbukaan dalam mengelola laporan keuangan agar mengurangi praktik korupsi kolusi dan nepotisme serta tindakan pencucian uang yang lagi marak terjadi pada organisasi.

Berdasarkan latar belakang diatas terlihat bahwa sejalanannya dengan reformasi pemerintahan maka peraturan pemerintahan semakin baik. Perubahan peraturan pemerintah ini mengakibatkan adanya pro-kontra mengenai siap atau tidak pemerintah mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual menghadirkan tantangan baru di dunia

¹⁵ Mediaswati, "Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah."

pemerintahan. Dalam proses penerapannya diperlukan adanya sumber daya manusia sebagai pembuat dan pengguna informasi keuangan, sarana dan prasarana sistem informasi yang ada di pemerintahan.

Dalam penelitian yang dilakukan Farida, 2017 yang berjudul “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua di Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara”. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 berbasis akrual akan meningkatkan kualitas keuangan pernyataan dan terwujudnya tata kelola yang baik selain mengetahui kinerja pemerintah. Berlakunya Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Berbasis Akrua (SAP) membawa perubahan signifikan dalam sistem pelaporan keuangan. Perubahan tersebut diharapkan memberikan gambaran lengkap tentang posisi keuangan, menyajikan informasi akrual tentang hak dan kewajiban, dan berguna dalam mengevaluasi kinerja. Penelitian ini didasarkan pada kualitatif metode interpretatif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada laporan keuangan dan laporan anggaran tahun 2016 Badan Lingkungan Hidup Pemprovsum telah mampu menerapkan full atau sepenuhnya standar akuntansi pemerintah berbasis akrual berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010. Laporan keuangan yang akan dihasilkan Badan Lingkungan Hidup Pemprovsum sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 menjadi bertambah kuantitasnya menjadi 7 laporan yaitu; laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Adapun kendala-kendala dalam menerapkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 pada Badan Lingkungan Hidup terungkap antara lain terkait dengan penguasaan teknologi informasi sehingga perlu pelatihan atau seminar bagi para pegawai seperti pada bagian/staff keuangan agar kedepannya hambatan dapat

diminimalisir melalui peningkatan kemampuan kerja para staff di Badan Lingkungan Hidup ini.¹⁶

Penelitian yang dilakukan Syrienda Yanni, Hasan Basri, 2019 yang berjudul “Problematika Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah Aceh Tengah” bertujuan untuk menganalisis permasalahan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah strategis yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasi masalah penerapan akuntansi berbasis akrual dengan mengambil studi kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Metode yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual pada Pemda Kabupaten Aceh Tengah telah didukung dengan adanya peraturan Bupati Aceh Tengah mengenai kebijakan akuntansi dan sistem prosedur SAP Kabupaten Aceh Tengah. Permasalahan yang terjadi adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memadai baik dari segi pengalaman maupun dari latarbelakang pendidikan pada Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah. Kemudian langkah strategis yang dilakukan Pemda Kabupaten Aceh Tengah dalam mengatasi permasalahan SAP berbasis akrual melalui pelatihan khusus, pendanaan biaya yang sudah dianggarkan dan teknologi dan sistem informasi yang mendukung.¹⁷

Penerapan SAP berbasis akrual harus diterapkan oleh seluruh entitas pemerintahan termasuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah agar terciptanya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan. Upaya untuk mencapai pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan Kota Bandar Lampung melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

¹⁶ Farida Khairani Lubis, “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pada Pemerintahan Kota Pontianak,” *Kajian Ilmiah Akuntansi* 6, no. 4 (2017): 17–31, <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/ejafe/article/view/22368>.

¹⁷ Yanni Syrienda, Hasan Basri, and Heru Fahlevi, “Problematika Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah Aceh Tengah,” *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 4, no. 1 (2019): 56–68, <https://doi.org/10.24815/jped.v4i1.10923>.

Daerah (BPKAD) yang bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) dan sebagai instansi yang melaksanakan sistem akuntansi serta pelaporan daerah wajib melakukan pelaporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku atas transaksi yang terjadi pada pemerintah daerah.

Melalui wawancara yang dilakukan pada Senin, 8 Februari 2021 kepada salah satu pegawai BPKAD menyebutkan bahwa BPKAD menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 secara bertahap dari tahun 2014 sudah membuat laporan keuangan dengan dua basis yaitu basis kas dan akrual, selanjutnya pada tahun 2015 BPKAD hanya membuat laporan keuangan sesuai dengan SAP yang diberlakukan yaitu PP No. 71 Tahun 2010 hingga saat ini yaitu tahun 2021. Namun dalam menyusun laporan keuangan tersebut mengalami beberapa kendala seperti kurangnya sosialisasi mengenai Peraturan Pemerintah yang baru, kurangnya pegawai yang paham terkait akuntansi, adanya program yang belum maksimal walaupun satu induk, dan adanya penambahan jurnal yang semula hanya empat laporan keuangan pokok menjadi tujuh laporan keuangan sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami dan melakukan pelaporan laporan keuangan.

Dalam praktiknya akuntansi pemerintahan berbasis akrual ini tidak selalu berjalan dengan mulus dan lancar. Hal ini dikarenakan salah satunya oleh perbedaan karakteristik lingkungan sektor publik. Rendahnya kualitas laporan keuangan pemerintah pada saat ini masih banyak disebabkan oleh aparatur pemerintah yang resisten terhadap reformasi pengelolaan Keuangan Negara, yang mana ditunjukkan dengan mental korup pemerintah yang masih sangat kuat. Disamping itu, masalah lain yang berhubungan dengan kemampuan pemerintah dalam menyusun dan melaporkan laporan keuangan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dipandang masih terbatas, yang disebabkan tidak memadainya Sumber Daya Manusia yang menangani pengelolaan dan pelaporan keuangan di pemerintah.

Oleh karena itu, penerapan akuntansi akrual juga harus dikaji lebih mendalam. Meskipun telah diamanatkan oleh

undang-undang. Kesiapan SDM, dukungan teknologi informasi, kondisi sosial politik yang kondusif, serta dukungan dari auditor pemerintah, mutlak diperlukan agar reformasi akuntansi pemerintahan ini dapat berjalan dengan sukses dan memperoleh manfaat yang diharapkan.

Hal inilah yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP PP NO. 71 TAHUN 2010 DALAM PENYUSUSNAN LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG”**.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Batasan masalah berguna agar penelitian dapat terarah sesuai judul dan kemampuan yang dimiliki peneliti sehingga penelitian pun tidak keluar dari apa yang akan dibahas. Dalam penelitian ini yang dibahas hanya mengenai penerapan Akuntabilitas dan Transparansi setelah perubahan SAP menjadi PP No. 71 Tahun 2010 dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengelolaan dan Aset Kota Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung semenjak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010?
2. Apakah Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung semenjak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sudah sesuai dengan Perspektif Islam?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung semenjak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
2. Untuk mengetahui Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung semenjak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sudah sesuai dengan Perspektif Islam.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti
 Penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas akhir untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana ekonomi bisnis islam jurusan akuntansi syariah serta menambah wawasan untuk mengetahui Laporan Keuangan terkait Peraturan Pemerintahan No. 71 Tahun 2010 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung.
2. Bagi Pemerintah
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
3. Bagi Pembaca dan Pihak Lain
 Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan menjadi refrensi bagi peneliti selanjutnya di bidang akuntansi syariah umumnya dalam menganalisis Peraturan Pemerintahan No. 71 Tahun 2010.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan (Studi Pustaka)

1. Gita Desipradani dan Zeni Rusmawati (2017) “Penyajian Laporan Keuangan PEMKOT Surabaya dalam Penerapan PP No. 71 Tahun 2010”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah kota Surabaya sudah membuat laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2015 sesuai dengan PP No. 71

Tahun 2010 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Penyusunan LRA dan Laporan Perubahan SAL menggunakan basis kas sedangkan neraca, LO, LPE menggunakan basis akrual. Namun masih terdapat kendala dalam proses penyusunan laporan keuangan terutama dalam hal sumber daya manusia (SDM) yang berada di 72 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum terlalu memahami akuntansi pemerintahan hal ini dikarenakan latar belakang pendidikan tenaga akuntansi tersebut merupakan akuntansi komersil yang berbeda dengan ilmu akuntansi pemerintahan.¹⁸

2. Yohanis Tuaputimain (2018) “Analisis Kesiapan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Study atas Implementasi PP Nomor 71 Tahun 2010)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan pemerintah daerah dalam implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual merupakan refleksi dari suatu formalitas. Hal tersebut didukung dengan adanya peraturan pemerintah daerah dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. kompleksitas laporan keuangan menjadi faktor utama dalam sikap resisten pengelola keuangan pemerintah daerah dalam implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. sedangkan dari sisi budaya organisasi pemerintah daerah diwajibkan menerapkan SAP berbasis akrual.¹⁹
3. Sri Ayem dan Risda (2019) “Pengaruh Penerapan PP No. 71 Tahun 2010, Pemanfaatan E-SBN Ritel Online dan Good

¹⁸ Gita Desipradani and Zeni Rusmawati, “Penyajian Laporan Keuangan Pemkot Surabaya Dalam Penerapan PP No. 71 Tahun 2010,” *Jurnal Balance* XIV, no. 2 (2017): 14–28.

¹⁹ Yohanis Tuaputimain, “Analisis Kesiapan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Study Atas Implementasi Pp Nomor 71 Tahun 2010),” *Jurnal Ekuivalensi* 4, no. Ekonomi Bisnis (2018): 120–39.

Governance (GG) terhadap Keterandalan Laporan Keuangan”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 berpengaruh negatif dan good governance berpengaruh positif secara signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan Pemkot Yogyakarta. *E-sbn ritel online* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemkot Yogyakarta. Kompetensi penerapan PP No. 71 Tahun 2010, pemanfaatan *e-sbn ritel online*, good governance dapat berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan Pemkot Yogyakarta.²⁰

4. Erina Sudaryati dan Toton Da'i Permana (2020) “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur”. Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Laporan keuangan disajikan dengan basis akrual mulai tahun anggaran 2015 dan disusun menggunakan SIBAKU yang merupakan aplikasi akuntansi, 2) Perubahan SAP akrual berpengaruh terhadap metode dan tugas bagian Kepala Subbag Keuangan, 3) Kendala yang dihadapi pada awal perubahan kebijakan basis akuntansi adalah kurangnya sosialisasi dari BPKAD, kurangnya SDM, dan aplikasi SIBAKU sering eror dan lamanya proses konversi data manual ke database SIBAKU yang baru.²¹
5. Andry Kusuma, Abdul Rahman Mus dan Darwis Lannai (2020) “Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 pada Inspektorat Kabupaten Enrekang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan isnpektorat Kabupaten

²⁰ Sri Ayem, “Pengaruh Penerapan PP No. 71 Tahun 2010, Pemanfaatan E-SBN Ritel Online dan Good Governance (GG) Terhadap Keterandalan Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Yogyakarta)” 3, no. 1 (2019): 49–58, <https://doi.org/10.29230/ad.v3i1.3505>.

²¹ Erina Sudaryati and Toto Da'i Permana, “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur,” *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 5, no. 1 (2020): 1, <https://doi.org/10.20473/baki.v5i1.16965>.

Enrekang telah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.²²

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Lokasi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpolah) dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Filsafat postpositivisme sering juga disebut sebagai paradigma interpretif dan konstruktif yang memandang realitas sosial dengan sesuatu yang holistik/utuh, kompleks, dinamis, penuh makna dan hubungan gejala bersifat interaktif (*reciprocal*).²³

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena topik yang diambil perlu dieksplorasi dan dikaji lebih mendalam untuk menyajikan suatu pandangan yang detail dengan permasalahan yang sudah dipaparkan setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Penelitian ini dilaksanakan instansi pemerintahan yang berlokasi di Jl. Dr Susilo No. 2 Bandar Lampung. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan salah satu instansi pemerintahan yang menyusun laporan keuangan dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan. Oleh karena itu, instansi ini menjadi objek

²² Andry Kusuma, "Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 Pada Inspektorat Kabupaten Enrekang" 1, no. 2 (2020): 37–41, HTTP.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2012).

yang dipilih untuk diteliti bagaimana penerapan PP No. 71 Tahun 2010 dalam menyusun laporan keuangan.

2. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari penulis. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi secara langsung di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai sumber yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap kebijakan PP Nomor 71 Tahun 2010.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. data yang diperoleh selain data primer terkait informasi-informasi yang didapat dari media lain untuk melengkapi kebutuhan penelitian, antara lain: Literatur-literatur dan buku-buku yang berhubungan dengan akuntansi berbasis akrual serta PP Nomor 71 Tahun 2010, profile dari BPKAD Kota Bandar Lampung, dan data-data lainnya yang diperoleh dari BPKAD Kota Bandar Lampung

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan elektron)

maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat di observasi dengan jelas.²⁴

Metode ini digunakan untuk mengamati dan mencatat segala hal yang berkaitan dengan judul penelitian agar data yang diambil dapat mendukung hasil penelitian mengenai Penerapan PP No. 71 Tahun 2010 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asrt Daerah.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai Teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya-tidaknya pada pengetahuan atau keyakinan pribadi.²⁵

Metode ini dilakukan secara langsung kepada pihak yang terlibat dan terkait agar mendapatkan penjelasan dan kondisi yang sebenarnya. Pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap memiliki informasi kunci yang dibutuhkan oleh peneliti.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan,

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Tetapi perlu dicermati bahwa tidak semua dokumen memiliki kredibilitas yang tinggi. sebagai contoh banyak foto yang tidak mencerminkan keadaan aslinya, karena foto dibuat untuk kepentingan tertentu. Demikian juga autobiografi yang ditulis untuk dirinya sendiri, sering cenderung subjektif.²⁶

Metode dokumentasi dianggap sebagai pelengkap dari metode observasi dan wawancara dan merupakan proses untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan oleh peneliti.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian sangat diperlukan adanya analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁷

Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara, hasil observasi, dan laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Setelah data-data ini diperoleh peneliti, maka akan dilakukan analisis data di mana peneliti menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid.

sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu. Adapun tahapan-tahapan analisis data dalam penelitian ini:

- a. Pengumpulan data, yaitu teknik penggalian data yang berkaitan dengan sumber dan jenis data dimana peneliti akan mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan.
- b. Reduksi data, adalah proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan sehingga data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu diperlukan.
- c. Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, network, atau grafis sehingga data dapat dikuasai.
- d. Pengambilan keputusan atau verifikasi, berarti bahwa setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk itu diusahakan mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan dan sebagainya. Jadi, dari data tersebut berusaha diambil kesimpulan. Verifikasi dapat dilakukan dengan keputusan didasarkan pada reduksi data, dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

Keempat komponen tersebut saling interaktif yaitu saling mempengaruhi dan terkait. Pertama-tama dilakukan penelitian di lapangan dengan mengadakan wawancara atau observasi yang disebut tahap pengumpulan data. Karena data- data, pengumpulan penyajian data, reduksi data, kesimpulan-kesimpulan atau penafsiran data yang dikumpulkan banyak maka diadakan reduksi data. Setelah direduksi maka kemudian

diadakan sajian data, selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian data. Apabila ketiga hal tersebut selesai dilakukan, maka diambil suatu keputusan atau verifikasi.²⁸

I. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Skripsi yang dibuat oleh penulis memiliki 5 bab yang disusun secara terperinci.

Bab I Pendahuluan, terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II landasan Teori, dalam bab ini peneliti melakukan pembahasan mengenai teori yang digunakan. Teori dijelaskan secara rinci dari pembahasan secara umum ke khusus dimulai dari pemahaman mengenai akuntansi dan standar akuntansi pemerintahan, basis akuntansi, laporan keuangan pemerintahan, serta komponen laporan keuangan menurut PP No. 24 Tahun 2005 dan PP No. 71 Tahun 2010.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, di bab ini menjelaskan tentang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung (BPKAD) seperti kedudukan, tugas, fungsi, visi, misi dan struktur organisasi.

Bab IV Analisis Penelitian di bab ini menjelaskan Analisis Data Penelitian dan Temuan Peneliti setelah melakukan Penelitian di BPKAD

Bab V Penutup, berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan rekomendasi berupa saran bagi instansi dan peneliti selanjutnya.

²⁸ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif [Qualitative Data Analysis]," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Setelah melakukan penelitian maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
2. Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung sudah sesuai dengan Perspektif Islam yang terkandung dalam Q.S. An-Nisa ayat 58, Q.S. An-Nisa ayat 29 dan Q.S Al-Baqarah ayat 282.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Intansi Pemerintah
Sebaiknya perusahaan meningkatkan Sumber Daya Manusia serta dapat memberi kepercayaan kepada publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.
2. Bagi peneliti
Untuk peneliti selanjutnya disarankan melakukan penelitian pada instansi lainnya atau memperluas objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Afiah, Nunuy Nur. *Akuntansi Pemerintah: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Erlina, Omar Sakti Rambe, Rasdianto. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Indonesia: Salemba Empat, 2019.
- Harahap, Sofyan Syafri. *Teori Akuntansi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ifat Fauziah. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Indonesia: Ilmu, 2018.
- Sari, Eka Nurmala. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Medan: Perdana Publishing, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Wiroso. *Akuntansi Transaksi Syariah. Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia, 2019.
- Wulandari, and Muhammad. *Teori, Konsep Dan Aplikasi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.

JURNAL

- AC, Ali Mauludi. “AKUNTANSI SYARIAH; Pendekatan Normatif, Historis Dan Aplikatif.” *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2014): 59.
<https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i1.366>.
- Albugis, febriana F. “Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi Akuntabilitas

- Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.”
Jurnal EMBA 4, no. 3 (2016): 78–89.
- Amalia, Nahdliatul, and Tika Widiastuti. “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Muzaki Membayar Zakat.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 6, no. 9 (2020): 1756.
<https://doi.org/10.20473/vol6iss20199pp1756-1769>.
- Ayem, Sri. “Pengaruh Penerapan PP No 71 Tahun 2010 Pemanfaatan E-SBN Ritel Online Dan Good Governance Terhadap Keterandalan Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Yogyakarta)” 3, no. 1 (2019): 49–58.
<https://doi.org/10.29230/ad.v3i1.3505>.
- Desipradani, Gita, and Zeni Rusmawati. “Penyajian Laporan Keuangan Pemkot Surabaya Dalam Penerapan PP No. 71 Tahun 2010.” *Jurnal Balance* XIV, no. 2 (2017): 14–28.
- Indonesia, Republik. “Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010,” 2010, 1–413.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Kemendagri. “Konsep Dan Siklus Akuntansi Pemda” 5, no. 1 (2010): 1–88. Modul-1-Konsep-dan-Siklus-Akuntansi-Pemda.pdf.
- Kusuma, Andry. “Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 Pada Inspektorat Kabupaten Enrekang” 1, no. 2 (2020): 37–41. HTTP.
- Lubis, Farida Khairani. “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pada Pemerintahan Kota Pontianak.” *Kajian Ilmiah Akuntansi* 6, no. 4 (2017): 17–31.
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/ejafe/article/view/22368>.
- Mahardini, Nikke Yusnita, and Ade Miranti. “Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015.” *Jurnal Akuntansi* :

- Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)* 5, no. 1 (2018): 22.
<https://doi.org/10.30656/jak.v5i1.500>.
- Mediaswati, Rina. “Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.” *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)* 17, no. 1 (2013): 29–45.
<https://doi.org/10.22146/jkap.6847>.
- Niu, Fitria Ayu Lestari, Herman Karamoy, and Steven Tangkuman. “Analisis Penerapan PP. No. 71 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kotamobagu” 2, no. 71 (2014): 714–22.
- Onsardi, Marini, and Ezizia Selvia. “Accountability in the Management of Village Fund From The Islam Perspective.” *Concept and Communication* null, no. 23 (2019): 301–16.
<https://doi.org/10.15797/concom.2019..23.009>.
- Pangalila, Billy Rivaldy, Sifrid S Pangemanan, Jessy D L Warongan, Fakultas Ekonomi, and Universitas Sam Ratulangi. “Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 16, no. 4 (2016): 234–46.
- “Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 62 Tahun 2016,” n.d.
- Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. “Penerapan SAP Berbasis Akrua Pada PEMDA.” *Kebijakan Akuntansi* 2013 (2013): 1–8.
- Rizali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif [Qualitative Data Analysis].” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81.
- Rizaldi, Mohammad Fachmi. “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua (Accrual Basis) Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 (Studi Kasus Pada

- Pemerintahan Kota Malang).” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–99.
- Setyanto, Eko. Ritchi, Hamzah. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi AKuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah (Survey Atas Kompetensi Aparatur, Kualitas Software SIA Penerapan SPI Dan Penerapan SAP Pada Pemerintah Daerah Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Jawa Barat) Eko.” *Ilmiah Akuntansi* 9, no. 1 (2018): 51–69.
- Sudaryati, Erina, and Toto Da’i Permana. “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur.” *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 5, no. 1 (2020): 1.
<https://doi.org/10.20473/baki.v5i1.16965>.
- Syarienda, Yanni, Hasan Basri, and Heru Fahlevi. “Problematisasi Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah Aceh Tengah.” *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 4, no. 1 (2019): 56–68.
<https://doi.org/10.24815/jped.v4i1.10923>.
- Tuaputimain, Yohanis. “Analisis Kesiapan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Study Atas Implementasi Pp Nomor 71 Tahun 2010).” *Jurnal Ekuivalensi* 4, no. Ekonomi Bisnis (2018): 120–39.
- Waluya, Atep Hendang, and Aforisma Mulauddin. “Akuntansi: Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam QS. Al Baqarah (2): 282-284.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12, no. 2 (2020): 282–84.
- Wiryaningsih, Ni Nengsih Dwi, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, and Made Aristia Prayudi. “Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Bangli.” *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha* 8, no. Transisi dari Kas Basis ke Akrua Basis (2017): 12.
- Zawitri, Sari, Ninik Kurniasih, and Theresia Siwi Kartikawati.

“Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua
Sebagai Implementasi PP No. 71 Tahun 2010 Pada
Politeknik Negeri Pontianak.” *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan
Kewirausahaan* 4, no. 1 (2015): 24.
<https://doi.org/10.26418/jebik.v4i1.11459>.

Zulkifli, and Sulastiningsih. “Rerangka Konseptual Pelaporan
Keuangan Dalam Perspektif Islam,” n.d.

WEB

“Arti Kata Analisis - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
Online.” Akses 15 Maret 2021. <https://kbbi.web.id/analisis>.

“Arti Kata Susun - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
Online.” Akses 15 Maret 2021. <https://kbbi.web.id/susun>.

“Arti Kata Terap² - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
Online.” Akses 15 Maret 2021. <https://kbbi.web.id/terap-2>.

“Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.” Akses 15 Maret
2021. <https://www.blitarkab.go.id/2012/06/11/dinas-ppkad/>.

“BPKAD Kota Bandar Lampung.” Akses 4 Juni 2021.
<https://bpkadkotabalam.com/tupoksi>.

“BPKAD Kota Bandar Lampung.” Akses 4 Juni 2021.
<https://bpkadkotabalam.com/visimisi>.

WAWANCARA

Budiman, Andi. *Mengenai SAP BPKAD*. Wawancara